

Implementasi Kebijakan Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga dalam Meningkatkan Mutu Guru di SMP Kecamatan Bula Kabupaten Seram Bagian Timur

Muh. Ali Kilbaren¹, R. Kempa², Sumarni Rumfot³

¹ Universitas Pattimura; Indonesia; kilbarenali16@gmail.com

² Universitas Pattimura, Indonesia; rudolfkempa@gmail.com

³ Universitas Pattimura, Indonesia; sumarnirumfotmarni@gmail.com

ARTICLE INFO

Keywords:

Teacher Quality Policy Implementation

Article history:

Received 2024-03-27

Revised 2024-05-17

Accepted 2024-06-30

ABSTRACT

Policy implementation in principle is a way for a policy to achieve its goals. The implementation process will vary depending on the nature of the policy being implemented. Different decisions will show the characteristics, structures and relationships between the factors that influence the implementation of public policy so that the implementation process will also experience differences. The characteristics of education policy include (1) having goals, (2) having formal legal aspects, (3) having operational concepts. Compiled by the authorities, the formulator has capacity in the field of education, can be measured and evaluated, has a systematic formulation, and is prioritized. Policy implementation is seen in a broad sense, which is the stage of the policy process immediately after the enactment of the law. Implementation is seen broadly as having the meaning of implementing laws in which various actors, organizations, procedures and techniques work together to carry out policies in an effort to achieve the goals of policies or programs. Implementation of school quality assurance is a government policy to improve the quality of education. Implementation of a quality assurance system in primary and secondary education refers to standards according to applicable regulations. The results of the study show that the planned policies related to aspects of quality improvement do not indicate the direction and targets that must be achieved, this is due to the techniques and strategies in the formulation of policies related to programs that show a focus on solving educational problems related to quality. The quality of education is influenced by the competence of teachers while the academic qualifications of teachers are at the secondary school level (97.0%) for elementary schools (69.4%) for elementary schools (38.6%) for S1. For the level of certification (PAUD has been certified 0% - not yet certified 99.5%) School (Elementary has been certified 6.8% - has not been certified 93.2%) and Secondary Education (certified 8.3% and not yet certified 91.7 %).

This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.



Corresponding Author:

Muh. Ali Kilbaren

Universitas Pattimura; Indonesia; kilbarenali16@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Pada dasarnya implementasi kebijakan merupakan proses yang sangat menentukan sekaligus menenangkan. Proses ini menjadi disebabkan akhir dari semua kebijakan yang sudah diambil selalu pada tahap implementasi. Sebagai tolak ukur keberhasilan kebijakan pemerintah lewat dinas teknis yaitu dinas pendidikan dalam pengembangan mutu pendidikan adalah dapat dilihat pada bagaimana implementasinya. Rumusan kebijakan yang dibuat bukan hanya sekedar berhenti pada tataran rumusan suatu kepentingan, melainkan harus secara fungsional dilaksanakan. Sebaik apapun akan dapat dirasakan manfaatnya, jika sudah di implementasikan, akan lebih bermanfaat.

Konteks perencanaan program yang menjadi kebijakan pendidikan tidak didasarkan pada analisis kebutuhan serta aspek peningkatkan mutu guru, pada beberapa kasus yang ditemukan meliputi sebaran guru disemua jenjang pendidikan tidak memenuhi aspek pemerataan guru, hal ini sebagaimana menumpuknya guru pada daerah pusat kota sedangkan di daerah yang jauh dari pusat kota masih terdapat kekurangan guru. Ini menunjukkan bahwa sistem tata kelola pendidikan masih dibawah standar atau tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Minimnya keberpihakan *stakeholder* terhadap kebijakan pengelolaan pendidikan berkaitan dengan tata kelola peningkatan kualitas dan mutu guru di Kabupaten Seram Bagian Timur, Oleh karena itu dibutuhkan komitmen dan konsistensi sebagaimana tertuang dalam peraturan daerah terkait dengan tata kelola pendidikan sebagai strategi perencanaan dalam mengimplementasikan program pendidikan.

Pemerataan guru dan kualifikasi guru pada semua jenjang pendidikan perlu dilakukan melalui analisis kebutuhan dan strategis yang direncanakan. melalui pengawasan, evaluasi serta peran serta lembaga yang berkaitan dengan pendidikan agar mampu meningkatkan sumber daya manusia dan mutu pendidikan khusus Seram Bagian Timur, agar sejajar dengan kabupaten kota lain di Maluku. Indikator utama dari lemahnya tata kelola pendidikan sebagaimana telah di jelaskan di dalam Undang-undang sulit diwujudkan sebab interfensi atau kebijakan politik sangat tinggi dan berpengaruh terhadap kualifikasi guru serta peningkatan kualitasnya.

Sebagaimana komitmen pemerintah daerah melalui pernyataan Visi Misi pemerintah daerah sebagai pemegang kebijakan di daerah yang bertujuan untuk mewujudkan masyarakat Seram Bagian Timur yang maju, nyaman serta mendorong peningkatan sumber daya manusia (SDM) yang Berbudaya, Religius, Nasionalis, Kompetitif dan Berdaya Saing. Oleh karena itu pembangunan pendidikan maupun pembinaan kepemudaan dan olahraga di dinas harus terprogram dan terencana secara berkelanjutan serta terintegrasi dengan rencana kerja pemerintah daerah (RKPD). Hal ini sejalan dengan implementasi kebijakan yang pertama dapat dilihat secara sistem (*input, proses, output* dan *outcome*) yang tertuang pada Roadmap Kabupaten Seram Bagian Timur sesuai Surat Keputusan Bupati Seram Bagian Timur No. 314 Tahun 2016 pada Tanggal 07 September Tahun 2016, berdasarkan kondisi pendidikan dasar dan menengah pertama di Kabupaten Seram Bagian Timur, jika ditinjau berdasarkan 27 indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) masi banyak yang perlu dibenahi. Mesti juga diakui bahwa hasil upaya pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan Mutu Pendidikan telah memaksimalkan sumber-sumber dana yang tersedia sehingga pemenuhan 27 indikator SPM sebagian telah terpenuhi baik 14 indikator melalui dana APBD langsung maupun 13 indikator melalui dana BOS pada satuan pendidikan. Upaya-upaya Pemerintah Daerah mesti juga diberi penghargaan karena pemenuhan SPM sebagai bentuk tanggung jawab Pemerintah Daerah pada indikator (IP1) hampir maksimal.

Hasil penelitian yang menggunakan sistem sampling dilakukan oleh tim SPM dengan melibatkan pengawas sekolah Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Seram Bagian Timur, menggambarkan bahwa indikator pemenuhan SPM pada jenjang SD/MI dan SMP/MTs yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah (IP 1-14) rata-rata baru mencapai di atas 60%. Sedangkan pemenuhan jenjang SD/MI dan SMP/MTs pada setiap indikator yang merupakan tanggung jawab sekolah/ madrasah (IP15-27) baru rata-rata dibawah 45 %. Ini menggambarkan bahwa satuan pendidikan belum sepenuhnya mencermati permasalahan-permasalahan internal yang kemudian dicarikan pemecahan masalahnya.

Permasalahan pendidikan di Kabupaten Seram Bagian Timur dari sisi peningkatan mutu guru terletak pada konteks sumber daya pendidikan yang dapat disebut sebagai manajemen pendidik (guru) dan tenaga pendidik (tenaga administrasi). Dalam sebuah lembaga pendidikan pendidik mempunyai tugas yang hampir tidak dapat dibedakan, sebab sama-sama bekerja dalam lembaga yang sama yaitu pada lembaga pendidikan.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah 7 Informan utama dan ditambah dengan 2 informan pendukung diantaranya. Teknik pengumpulan data dalam penelitian antara lain : Observasi, Wawancara, dan Dokumen. Pemeriksaan keabsahan data antara lain (1) Kepercayaan, (2) Keteralihan, (3) kebergantungan, dan (4) Kepastian. Teknik Analisis Data yang digunakan adalah terdiri dari tiga alur yaitu: reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan/verifikasi.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebijakan yang dilakukan oleh dinas pendidikan dalam menyediakan tenaga pendidik

Dalam rangka mewujudkan cita-cita mencerdaskan kehidupan bangsa dan sejalan dengan visi Pendidikan dan Kebudayaan Nasional dan visi Pemuda dan Olahraga, Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Seram Bagian Timur mempunyai visi tahun 2021-2026 untuk menghasilkan insan SBT yang cerdas, dengan Berkaitan dengan hal tersebut, maka dirumuskan visi Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Seram Bagian Timur yakni terwujudnya kualitas pendidikan pemuda dan olahraga yang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur budaya. Salah satu kewenangan dinas pendidikan sebagaimana tertuang dalam undang-undang yang mengatur tentang tugas pemerintah daerah dalam pembagian kewenangan antara pusat dan daerah kemudian diperkuat dengan undang-undang otonomi daerah, maka tugas dinas pendidikan lebih terarah dan fokus pada urusan bidang pendidikan. Melalui pelimpahan kewenangan tersebut dinas pendidikan dapat menyiapkan segala kebijakan dan langkah-langkah strategis dalam menata mutu guru di daerah. Diketahui bahwa kebijakan yang menjadi fokus atau kebutuhan utama yang harus diperhatikan dimana awal dari proses perjalanan kabupaten, hal yang pertama adalah bagaimana mengurus sumber daya manusia melalui kebijakan dan tata kelola pendidikan yang tepat. Maka pada saat itu Pemerintah Daerah melakukan kerja sama dengan beberapa perguruan tinggi melalui tugas belajar.

Sasaran implementasi kebijakan yang dimaksud disini adalah kegiatan atau aktifitas yang berkaitan dengan peningkatan mutu pada suatu daerah, yang menjadi tujuan dari kebijakan itu dirumuskan, dari penjelasan dalam hasil kutipan wawancara di atas menjelaskan bahwa untuk melaksanakan kegiatan berhubungan dengan mutu pada suatu jenjang pendidikan dapat dipisahkan antara tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, oleh karena sangat tidak efektif dalam pembinaan maka dibutuhkan peran unit pelaksana tugas dinas di lingkungan kecamatan.

Sementara kebijakan yang menjadi fokus dinas sebagaimana diamanatkan dalam undang-undang guru dan dosen dari hasil observasi dan pengamatan di lapangan ditemukan bahwa apa yang menjadi kebijakan yang di implementasikan tidak sesuai dengan kebutuhan daerah saat ini, hal ini juga ditemukan dalam kajian dokumen dimana program kerja dinas tahun 2022 lebih banyak fokus pada kegiatan kepemudaan, mengingat undang-undang ini membahas soal kompetensi yang wajib dimiliki oleh guru. Implementasi biasanya terkait dengan suatu kebijaksanaan yang ditetapkan oleh suatu lembaga atau badan tertentu untuk mencapai satu tujuan yang ditetapkan. Penjelasan dalam hasil wawancara di atas maksudnya pada Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 di dalam pasal 8 "guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikasi pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional kemudian di dalam pasal 10 menjelaskan bahwa kompetensi sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 meliputi kompetensi

pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial dan kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi.

Untuk meningkatkan sinergitas pelaksanaan kebijakan pembangunan daerah di bidang Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga maka sesuai rencana kerja tahun 2022 yang mengacu pada program pengembangan karir pendidikan dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan sekolah dasar melalui pemberian beasiswa berjenjang bagi guru berkualifikasi non sarjan ke S1 dan S1 ke S2 dengan nilai yang di tentukan berdasarkan rencana kerja dinas.

Kebijakan Implementasi dinas pendidikan dalam melaksanakan program pengembangan mutu guru. Implementasi dapat diartikan sebagai suatu proses penerapan atau pelaksanaan, atas kebijakan yang direncanakan untuk menjawab suatu kebutuhan dalam hal ini kebutuhan yang dimaksud adalah peningkatan mutu guru. Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya, tidak lebih dan kurang. Menurut Joko Purnomo (2020:2) mengutip pandangan Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier (1979), menjelaskan makna implementasi itu memahami apa yang senyatanya terjadi, sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijakan.

Pelaksanaan atau implementasi kebijakan bersangkut paut dengan ikhtiar-ikhtiar untuk mencapai tujuan dari ditetapkannya suatu kebijakan tertentu. Tahap ini pada dasarnya berkaitan dengan cara pemerintah bekerja atau proses yang dilakukan oleh dinas pendidikan untuk menjadikan kebijakan menghasilkan keadaan yang direncanakan. Mengingat makna dan sifat implementasi yang dapat dipahami dari berbagai dimensi, maka tahap ini sendirinya menunjukkan signifikasinya. Dalam hal ini pelaksanaan kebijakan dapat hanya berupa suatu proses sederhana untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Kenyataanya, proses yang terlihat sederhana itu, sesungguhnya justru tidak sederhana.

Hasil penelitian yang berhubungan dengan implementasi kebijakan peningkatan mutu guru pada Dinas pendidikan Kabupaten Seram Bagian Timur untuk secara teoritis tidak menunjukkan bahwa kebijakan yang selama ini dilakukan tidak melalui kajian dan analisis, Dengan demikian upaya meningkatkan mutu pendidikan, ada tiga faktor yang perlu diperhatikan yakni; (1) kecukupan sumber-sumber pendidikan seperti mutu tenaga kependidikan, biaya dan sasaran belajar. (2) mutu proses belajar yang mendorong siswa belajar secara efektif, dan (3) mutu keluaran dalam bentuk pengetahuan, sikap dan keterampilan. Sebagai indikator peningkatan mutu pendidikan di Sekolah dapat dilihat dari mutu lulusan, kualitas guru, sistem manajemen kepala sekolah, staf administrasi, proses pembelajaran, sarana dan prasarana, implementasi kurikulum serta sistem penilaian dan lainnya. Karena itu keterlibatan masyarakat sebagai bagian integral dalam meningkatkan mutu pendidikan dapat menjalin sinergitas, berkolaborasi membina dan mengembangkan mutu pendidikan di sekolah seoptimal mungkin sesuai standar yang telah ditetapkan.

Penjelasan dari beberapa sumber di atas menunjukkan bahwa dinas pendidikan kurang tanggap terhadap perkembangan pendidikan, dilihat dari keadaan ini serta melalui kajian dokumen yang dipaparkan sebelumnya maka disini disimpulkan bahwa sekolah berinisiatif melakukan kegiatan berhubungan dengan peningkatan mutu dan sebaran guru yang memiliki kompetensi merata di semua jenjang pendidikan.

Tabel: 1 Data Status Guru Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga

| No. | Jenjang Pendidikan | Status Pegawai | |
|-----|--------------------|----------------|---------|
| | | PNS | Non PNS |
| 1. | PAUD | 7,6% | 92,4% |
| 2. | SD | 6,8% | 93,2% |
| 3. | SMP | 39,0% | 61,0% |

Diketahui dari tabel di atas yaitu untuk jenjang pendidikan Sekolah Menengah Pertama guru berstatus ASN sebesar 39,0% sedangkan guru berstatus Non ASN sebesar 61,0%, terindikasi tenaga honor cukup tinggi dan status honor tidak disebut apakah kontrak daerah, propinsi atau P3K. Strategi

dinas dalam penataan mutu guru melalui reward dan apresiasi untuk mendorong guru dan sekolah lainnya agar berpartisipasi dalam program peningkatan mutu.

Hasil kajian dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) dan dokumen Rencana Kerja (RENJA) dinas Tahun 2022 dapat disampaikan dalam tabel dibawah ini:

Tabel: 2 Rencana Kerja Kabupaten Seram Bagian Timur tahun 20220

| Kode | Uraian Bidang | Lokasi | Keluaran Kegiatan/Tolak Ukur | Target | Hasil Kegiatan/Tolak Ukur | Pagu Indikatif | Prakiraan Maju Tahun 2023 |
|------|---|--------------|---|----------|--|----------------|---------------------------|
| | Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | | Peningkatan Tenaga Pendidik | Kegiatan | Kegiatan Penjaringan Tenaga GTT | 300.000.000 | 400.000.000 |
| | Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah | 15 Kecamatan | Monitoring dan Evaluasi Organisasi Pemuda Tingkat Sekolah | Kegiatan | Pemberian Beasiswa Berjenjang Bagi Guru Berkualifikasi non sarjana ke S1 dan s1 ke s2 Monitoring Pendataan Organisasi Kepramukaan Pada sekolah SD dan SMP | 250.000.000 | 300.000.000 |

Sumber: Analisis Dokumen Rencana Kerja Dinas Pendidikan Tahun 2022.

Kajian dalam penelitian ini menjadikan fokus pembahasan meliputi kegiatan identifikasi hal-hal pokok dan umum ke dalam analisis permasalahan penelitian meliputi implementasi kebijakan pemerintah daerah serta faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kualitas mutu guru membutuhkan tanggung jawab dinas pendidikan untuk merumuskan langkah-langkah dan strategis dalam melakukan penataan terhadap mutu guru khususnya di Kabupaten Seram Bagian Timur.

Guru bermutu adalah guru yang memenuhi atau melampaui standar kualifikasi akademik dan kompetensi guru dan mampu mengaktualisasikannya dalam pelaksanaan tugas profesionalnya. Ketersediaan guru bermutu perlu diupayakan melalui berbagai program seperti pendidikan (studi lanjut), oleh karena itu keaktifan organisasi tehnik seperti KKG/MGMP dapat merumuskan program kerja sekaligus melakukan evaluasi terkait dengan mutu guru yang menjadi pokok permasalahan dinas. Adapun data guru sesuai status dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Mutu pendidikan adalah kemampuan sekolah dalam pengelolaan secara operasional dan efisien terhadap komponen-komponen yang berkaitan dengan sekolah sehingga menghasilkan nilai tambah terhadap komponen tersebut menurut standar yang berlaku. Di dalam implementasi kebijakan pemerintah daerah untuk mewujudkan atau meningkatkan mutu guru di mana sekolah merupakan instrumen pelaksana program dinas. Sebagaimana menurut Suryadi P, (2002:12) menjelaskan bahwa mutu produk pendidikan akan dipengaruhi oleh sejauh mana lembaga mampu mengelola seluruh potensi secara optimal meliputi (1). Tenaga kependidikan, (2). Peserta didik, (3). Proses pembelajaran, (4). Sarana pendidikan, (5). Keuangan dan dan (6). Hubungan dengan masyarakat.

Mutu pendidikan dapat dipengaruhi oleh kompetensi guru yang menjadi salah satu faktor penyebab adalah sertifikasi, data guru yang sudah sertifikasi untuk jenjang PAUD, Pendidikan Sekolah Dasar dan Pendidikan Sekolah Menengah di Kabupaten Seram Bagian Timur antara lain dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel: 3 Data Guru Sertifikasi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga

| No. | Jenjang Pendidikan | Guru Sertifikasi | |
|-----|--------------------|------------------|-------|
| | | Sudah | Belum |
| 1. | PAUD | 0% | 99,5% |
| 2. | SD | 6,8% | 93,2% |
| 3. | SMP | 8,3% | 91,7% |

Sumber Data: Verifikasi Pusdatin, November 2021 (NPD Kab. SBT).

Pembahasan

Dalam rangka penyelenggaraan *good governance*, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, dan syah sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Perjanjian Kinerja.

Untuk Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik. Kebijakan dinas pendidikan dalam menyediakan tenaga pendidik atau guru merupakan proses yang tidak hanya menyangkut perilaku-perilaku badan adminstrasi yang bertanggung jawab untuk melaksanakan program dan menimbulkan ketaatan kepada kelompok sasaran, atau dengan istilah lain kelompok berkepentingan, melainkan juga menyangkut faktor-faktor hukum, politik, sosial yang lansung atau tidak lansung berepengaruh terhadap perilaku dari berbagai pihak yang dinilai terlibat dalam kemajuan program. Pada dasarnya implementasi kebijakan dinas pendidikan terhadap pengembangan sumberdaya manusia harus melihat pada Penyusunan Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Seram Bagian Timur tahun 2016-2021 dimaksudkan untuk menjabar Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Seram Bagian Timur terpilih sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Seram Bagian Timur tahun 2016-2021.

Sejalan dengan hasil penelitian diatas dan sesuai maksud pada undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 dalam pasal 8' yang bebrbicara tentang guru harus memilik kualifikasi akademik, kompotensi, sertifikasi pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memmiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional, kemudian di dalam pasal 10 menjelaskan bahwa kompetensi sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi sosial dan kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi.

Sebuah kebijakan yang tertuang dalam aturan perundang-perundang terhadap tenaga pendidik dan masyarakat secara ideal harus ditetapkan berdasarkan aspirasi dan kebutuhan pendidik dan

masyarakat, oleh karena itu semestinya sebelum kebijakan diberlakukan harus dapat tersosialisasi terlebih dahulu, termasuk dalam hal pengambil keputusan atau kebijakan di segi pendidikan. Pengukuran implementasi kebijakan dinas pendidikan dalam hal pendidikan merupakan sesuatu yang penting bahkan lebih penting dibandingkan perumusannya. Perlu diketahui bahwa kebijakan terhadap peningkatan mutu guru tidak hanya menjadi sekedar impian atau rencana yang sempurna yang tersimpan rapi sebagai sebagai arsip, apabila tidak dapat diimplimentasikan.

Dilihat dari Visi Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Seram Bagian Timur yaitu : "Terselenggaranya Layanan Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Yang Berkualitas Untuk Mewujudkan Masyarakat Seram Bagian Timur Yang Cerdas Komprehensif dan Berdaya Saing, Sedangkan untuk mewujudkan Visi Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Seram Bagian Timur tersebut di atas dilaksanakan Misi Dinas Pendidikan sebagai berikut ;

- a. Meningkatkan ketersediaan pendidikan dan perluasan akses pendidikan yang merata, terjangkau, setara, berkelanjutan serta berkeadilan bagi seluruh lapisan masyarakat;
- b. Mewujudkan kualitas/mutu dan relevansi pendidikan yang memiliki keunggulan serta memberdayakan lembaga
- c. pendidikan formal dan non formal;
- d. Mewujudkan dukungan sustainabilitas (keberlanjutan) lulusan PAUD ke Pendidikan Dasar dengan mengembangkan dukungan nyata pembangunan fasilitas pendidikan baru yang variatif dan kreatif;
- e. Mewujudkan pendidikan kecakapan hidup (life skill) yang mencakup kecakapan personal, sosial, akademik dan vocational (kejujuran seni) dalam meningkatkan sumber daya manusia yang cerdas, produktif, berkarakter dan berwawasan lingkungan serta memahami nilai – nilai budaya lokal;
- f. Mewujudkan kreatifitas, daya saing dan prestasi kepemudaan dan keolahragaan;
- g. Mewujudkan tata kelola dan tata nilai penyelenggaraan layanan prima pendidikan
- h. Meningkatkan kompetensi kepala sekolah, guru dalam penguasaan IT dan pengembangan literasi numerasi.
 - 1) Tingkat kesulitan teknis dari masalah yang bersangkutan dimana disatu pihak terdapat beberapa masalah sosial yang secara teknis mudah dipecahkan, 2. Tingkat kemajemukan dari kelompok sasaran. Hal ini berarti bahwa suatu program akan relative mudah diimplementasikan apabila kelompok sasarannya adalah homogen, karena tingkat pemahaman kelompok sasaran relatif sama.
 - 2) Proporsi kelompok sasaran terhadap total populasi, dimana sebuah program akan relatif sulit diimplementasikan apabila sasarannya mencakup semua populasi dan sebaliknya sebuah program relatif mudah diimplementasikan apabila jumlah kelompok sasarannya tidak terlalu besar.
 - 3) Cakupan perubahan perilaku yang diharapkan dimana sebuah program yang bertujuan memberikan pengetahuan atau bersifat kognitif akan relatif mudah diimplementasikan dibanding program yang bertujuan untuk mengubah sikap dan perilaku masyarakat.

Konsep implementasi yang berasal dari kerangka teoritik berangkat dari kebijakan itu sendiri dimana suatu tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran ditetapkan, tujuan disini antara lain adalah menyusun sebuah kebijakan untuk meningkatkan mutu guru sedangkan tujuan memiliki makna yang luas.

Langkah pertama membuat perencanaan pengadaan kemudian melakukan rekrutmen dan seleksi setelah itu melaksanakan penempatan dan penilaian kinerja. Alur berikut analisis lingkungan internal, kebijakan pimpinan, langkah berikut masuk pada kualifikasi akademik berkaitan dengan kompetensi lalu memperhatikan ketentuan dan regulasi yang berlaku sehingga kebijakan tersebut memiliki dasar hukum untuk diimplementasikan serta dibiayai. Dalam memberdayakan sekolah menjadi sekolah efektif adalah dengan membangun manajemen sekolah dengan karakteristik sebagai berikut.

1. Visi misi yang jelas dan target mutu yang harus sesuai dengan dengan standar yang telah ditetapkan secara lokal.

2. Memiliki output yang selalu meningkat setiap hari
3. Lingkungan sekolah yang aman, tertib menyenangkan
4. Seluruh personil memiliki visi dan misi Serta harapan yang tinggi untuk berprestai secara optimal
5. Memiliki evaluasi yang kontiniu dan komprehensif terhadap berbagai aspek akademik dan non akademik.

4. KESIMPULAN

Dari pembahasan hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 1) Kebijakan dinas pendidikan dalam peningkatan mutu guru di SMP Kecamatan Bula tidak menunjukkan fokus penyelesaian terkait dengan program dilaksanakan oleh dinas pendidikan Kabupaten Seram Bagian Timur, 2) Implementasi kegiatan yang dianggap keliru dan tidak berhubungan dengan fungsi dan teknis dinas diantaranya dalam renja tahun 2022 program peningkatan kapasitas organisasi kepramukaan yang tersebar pada. 3) Salah satu langkah dinas pendidikan yang nampak pada program peningkatan mutu guru yaitu dilaksanakan hubungan kerja sama atau MoU oleh dinas pendidikan dengan kampus Universitas Pattimura dalam membangun pendidika atau kuliah kerja sama oleh tenaga pendidik. 4) Program dan kegiatan yang berkaitan dengan peningkatan mutu guru, hanya dua kegiatan yang tertera dalam rencana kerja dinas pendidikan pemuda dan olahraga tahun 2022 pada jenjang pendidikan dasar, pengembangan karir pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan sekolah dasar melalui pemberian beasiswa berjenjang bagi guru berkualifikasi non sarjana ke S1 dan S1 ke S2 dengan. 5). Rencana kerja tahun 2022 juga program yang sama pengembangan karir pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan sekolah dasar melalui pemberian beasiswa berjenjang bagi guru berkualifikasi non sarjana ke S1 dan S1 ke S2. 6) Dalam renja tahun 2022 ditemukan dua kegiatan kepramukaan salah satunya adalah perkemahan bersama SD dan SMP atau jenjang siaga dan penggalang 7) Dari kajian dan analisis dokumen pada renja tahun 2022 ditemukan sekitar 80% program dan kegiatan dinas pendidikan berhubungan dengan unsur kepemudaan dan budaya.

REFERENSI

- Aan Komariah dan Djam'an Satori. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung Alfabeta.
- Abdul Hadis dan Hj.Nurhayati B. 2014. *Manajemen Mutu Pendidikan*. Alfabeta, Bandung
- Arikunto, Suharsimi dan Jabar, Cepi Safruddin Abdul. 2009. *Evaluasi Program Pendidikan: Pedoman Teoretis Praktis bagi Mahasiswa dan Praktisi Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Aslinda, 2023. Model Kebijakan Publik dan Teori Perubahan Kebijakan. Bantul: K-Media
- Berutu, Wahidah Yati Nur. 2019. *Analisis Sistem Penjaminan Mutu Internal Dalam Meningkatkan Kinerja Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris FKIP UMSU*, Tesis, Medan.
- Burhanudin Arif. (2017). *Implementasi Total Quality Management Untuk Meningkatkan Mutu Sekolah (Studi Kasus di MA Raudlatul Ulum Guyangan Pati)*. Tesis magister tidak di terbitkan Universitas Negeri Semarang.
- Basra, (2022). *Pengaruh Kompetensi Guru terhadap Peningkatan Kualitas Didik pada SMP Negeri di Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur*. Tesis magister tidak di terbitkan, Universitas Bosowa.
- Creswell, J. W. (2010). *Research design: pendekatan kualitatif, kuantitatif, dan mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Deni Koswara dan Nani Hartini. 2018. *Bunga Rampai Administrasi Pendidikan Teori dan Praktik*. Bandung: Alfa Beta.
- Dewa Ketut Sukardi. (2002). *Pengantar Pelaksanaan Program Bimbingan dan. Konseling*. Jakarta: Rhineka Cipta.
- Goetsch, D.L. dan D.L. Davis. 2002. *Introduction to Total Quality: Quality Management for Production, Process, and Service*. Edisi Terjemahan. Alih Bahasa oleh Benyamin Molan,

- Manajemen Mutu Total: Manajemen Mutu untuk Produksi, Pengelolaan, dan Pelayanan. Jilid I. Jakarta: Prenhalindo
- Hasbullah. 2015. *Kebijakan Pendidikan, dalam perspektif teori, Aplikasi dan Kondisi objektif Pendidikan di Indonesia*. PT. RajaGrafindo Persada. Jakarta.
- Handyaningrat, Soewarno. 1995. *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*. Jakarta : Toko Gunung Agung
- Hedwig, Rinda., Polla G. 2007. *Model Sistem Penjaminan Mutu*. Jakarta: Graha Ilmu
- Hajar Qurban, 2020. *Implementasi Kebijakan Peningkatan Profesionalisme Guru SMP Negeri 3 Hu'u Kabupaten Dompu Nusa Tenggara Barat*. Tesis magister tidak di terbitkan, Universitas Muhammadiyah Malang.
- J. Moleong, Lexy. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif, Edisi Revisi*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Josef Papilaya, 2021. *Manajemen Sumber Daya Manusia Pendidikan*. Alfabeta, cv. Jl. Gegerkalong Hilir No. 84 Bandung.
- Sugiyono, 2010. *Metode Penelitian Kualitatif & RND*. Alfabeta, Bandung.
- Margono. 2010. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Muhamad Mustari, 2014. *Manajemen Pendidikan*. PT Raja Grafindo Persada Jakarta.
- Muhammad Rifai dan Zamroni. 201. *Politik Pendidikan Nasional*. Ar-ruz Media. Depok, Sleman, Jogjakarta
- Nasution, M.N. 2005. *Manajemen Mutu Terpadu (Total Quality Management)*. Bogor: Ghalia Indonesia
- Nasution. 2003. *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*. Bandung: Tarsito
- Nurdin Usman. 2004. *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Najamuddin Arey, (2019). *Evaluasi Perencanaan dan Pengembangan Program pendidikan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Seram Bagian Timur* Tesis Magister, tidak diterbitkan, Universitas Pattimura, Ambon.
- Prim Masrokan Mutohar, "Formulasi Strategi Peningkatan Mutu Institut Agama Islam Negeri (IAIN) di Jawa Timur", *Jurnal Al-Idarah: Manajemen Pendidikan Islam*, Vol. 4 No. 2 (2019)
- Ridwan, Abdullah Sani, Isda Pramuniati, Anies Mucktiany. 2015. *Sistem Penjamin Mutu*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Rina Febriana, 2019. *Kompetensi Guru*. Bumi Aksara; Jakarta.
- Roadmap pendidikan Seram Bagian Timur. 2016/2017. *Standar Pelayanan minimal (SPM) Pendidikan Dasar*. Kabupaten Seram Bagian Timur.
- Rohiat. 2010. *Manajemen Sekolah*. Bandung: Refika Adikarya.
- Roswati. 2008. Evaluasi Program/Proyek (Pengertian, Fungsi, Jenis, dan Format Usulan), *Jurnal Pendidikan Penabur*-No.11/Tahun ke-7/Desember 2008. <http://www.bpkpenabur.or.id/files/Hal.%206471%20Evaluasi%20Program.pdf>. Diambil 12 Juni 2015.
- Rahmansyah Fahmi, 2022. *Implementasi Manajemen Mutu Dalam Meningkatkan Kompetensi Guru Man 1 Blitar*. Tesis magister tidak di terbitkan, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
- Sallis.E. 2002. *Total Quality Manajemen in Education (Third Edition)*. Kogan Page Ltd. London.
- Sugiyono, 2010. *Metodologi Penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Sugiyono. 2006. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.

